



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Mei 2016

Halaman: 14

Penerima Kartu Miskin Bertambah 5.000 Warga

• YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Jumlah penerima Kartu Menuju Sehat (KMS) atau kartu miskin di Kota Yogyakarta dipastikan akan bertambah. Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerima sekitar 5.000 nama baru untuk masuk sebagai penerima KMS 2017.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, mengatakan usulan penerima KMS baru tersebut merupakan hasil uji publik terhadap penerima KMS 2016. "Usulan baru ini akan diverifikasi bersama penerima KMS 2016 yang menduduki 18.730 KK ujiannya, Senin (16/5).

Menurutnya, sebagian besar usulan baru ialah warga yang tahun lalu memegang KMS namun tahun ini sudah tidak. "Kami tetap hormati usulan itu, toh perangkat warga setempat yang mengusulkan," katanya.

Sebelum dilakukan proses verifikasi, jelas dia, petugas akan mendatangi tiap kelurahan guna mengecek keberadaan warga yang diusulkan sebagai pemegang KMS tahun depan. Ditargetkan pada Juni atau sebelum puasa, seluruh data yang hendak diverifikasi sudah valid.

Dengan demikian, pada Agustus hingga September, proses verifikasi bisa dilakukan dengan mendatangi satu per satu warga miskin. Menurutnya, meski sempat ada wacana perubahan parameter sebagai dasar verifikasi, namun belum akan diterapkan tahun ini. Oleh karena itu, parameter masih menggunakan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 244/KEP/2012.

Ia menuturkan, terdapat tujuh aspek dan 17 indikator yang akan digunakan. Di antaranya meliputi gaji kepala keluarga, status tempat tinggal hingga kemampuan membeli sandang dan pangan. "Selama tidak ada perubahan dari kebijakan wali kota untuk mendata warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial, maka Kepwal 2012 itu yang digunakan," kata dia.

Diakui, saat ini sedang ada kajian untuk mengubah parameter, tapi kemungkinan sebagai pertimbangan bagi kepala daerah selanjutnya. Sementara pengalaman dua tahun terakhir, penetapan pemegang KMS selalu mengalami keterlambatan.

Meski begitu kata dia, pihaknya optimistis penetapan penerima KMS bisa diputuskan lebih cepat atau sebelum 31 Desember 2016. Hanya saja, penetapannya tidak dilakukan langsung oleh wali kota, melainkan pejabat wali kota karena kepemimpinan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono akan habis pada 22 Desember 2016.

Kabid Pengendalian Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Tri Masyatun, menambahkan hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan daftar penentuan pemegang KMS. "Nantinya, KMS bisa digunakan untuk layanan akses pendidikan gratis, kesehatan, dan jaminan sosial," ujarnya. ■ ■ ■ *Yandi Asidra*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005